

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

DISKUSI ILMIAH

**“Digitalisasi Desa Sebagai Percepatan Pelayanan Publik
Dalam Mewujudkan Good Governance”**



Laboratorium Aplikasi Komputer dan E-Government
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juli 2023

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesejahteraan sosial (social welfare state) sebagaimana dirumuskan dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Bab XIV UUD NRI Tahun 1945. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state merupakan sebuah konsep pemerintahan yang mana negara atau institusinya memegang peranan penting dalam perlindungan serta mensejahterakan kehidupan sosial dan ekonomi warga negaranya.

Sebagai negara kesejahteraan, rakyat berharap pada pemerintah agar dapat terselenggaranya good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. (Neneng Siti Maryam, 2016).

Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur good governance. Subarsono mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. (Alwi Hashim Batubara, 2015).

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertelele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. (Neneng Siti Maryam, 2016).

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan program digitalisasi desa.

Digitalisasi Desa dalam upaya pembangunan desa yang lebih terarah dan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan program pemerintah pusat dengan slogan "membangun Indonesia dari desa". Digitalisasi menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa. Hal tersebut dikarenakan tuntutan zaman, tuntutan perkembangan, tuntutan situasi yang terus bergerak menuju pada satu situasi yang disebut zaman digital. Digitalisasi merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dielakkan. Dengan adanya teknologi informasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. (humabetang.com). Melalui program digitalisasi desa, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari penyelenggara pemerintahan desa lebih terasa dan sangat mudah. penata kelolaan data yang lebih terfokus dan dapat di manfaat gunakan untuk pelaksanaan pemerintahan desa secara berkelanjutan dan tak terbatas waktu. Melalui program digitalisasi desa pula ,proses dokumentasi pelaksanaan pemerintahan desa di harapkan untuk lebih terdokumentasi dengan baik, dapat terus di implementasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga pusat data desa dapat di gunakan berkelanjutan atau terus menerus. (solopos.com)

Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut Laboratorium Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Diskusi Ilmiah sebagai bentuk dukungan dalam peningkatan kemampuan mahasiswa agar berfikir lebih kritis dan tanggap akan permasalahan disekitar.

TUJUAN

- Memberikan wawasan dan pengetahuan Tentang Digitalisasi pada desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang good governance.

MEDIA DAN WAKTU KEGIATAN

- Hari, Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023
- Waktu : 09.30 - Selesai WIB
- Media : Offline (Luring)
- Tempat : Mini Theatre Lantai 5 gkb 3 umsida kampus 1
- Biaya : FREE

- Fasilitas : E-Certificate, Poin, Ilmu yang bermanfaat

PESERTA DISKUSI ILMIAH

Diskusi Ilmiah diikuti oleh Mahasiswa Prodi Administrasi Publik

PEMBICARA

1. Mochammad Sohib (Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo)

SUSUNAN KEGIATAN

1. Pembukaan
2. Penyampaian Materi oleh Narasumber
3. TanyaJawab
4. Penutup

PENUTUP

Demikian Proposal kegiatan Diskusi Ilmiah dengan tema“Digitalisasi Desa Sebagai Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance” kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 23 Juli 2023.

Ketua Program Studi.

Administrasi Publik



Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial**



Poppy Febriana, M.Med.Kom

Lampiran Susunan Kepanitiaan

Pengarah : Poppy Febriana, M.Med.Kom

PenanggungJawab : Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

SUSUNAN PANITIA

Ketua Pelaksana : Hendra Sukmana, M.KP

Sekretaris : Hana Farasastin, S.AP

Bendahara : Silvia Nur Diana

Co.Acara : Widya Kristanti

Co. Publikasi&Promosi : Tiara Agustin

Renanda Ayu

Co.IT : M. Alfin Azrial Akbar
Diki Aulia Rahman

FOTO KEGIATAN



